



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**DARMANSYAH BIN SUKEMMA**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Tepi Sungai Kusan RT. 006 No. 25 Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**"

**ALUH MUSLIMAH BINTI SYAHRUN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Tepi Sungai Kusan RT. 006 No. 25, Desa Satiung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.BlcN tanggal 19 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 November 2016 dihadapan seorang penghulu bernama ABDUS SYUKUR di Desa

Hal 1 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA BlcN



Binawara Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama ILMANSYAH bin SYAHRUN karena pada saat itu aya kandung Pemohon II yang bernama SYAHRUN telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ABD. RAZAK dan AMAN HURIYU dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Darmansyah bin Sukemma) dengan Pemohon II (Aluh Muslimah binti Syahrin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2016 di Desa Binawara Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagai berikut :

➤ Posita Nomor 2

yang benar adalah : ... dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama ABD.RAZAK dan AMAN HURIYU ... .

untuk selebihnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa para pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) pada tanggal 08 Nopember 2016 dihadapan penghulu bernama Abdus Syukur di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Ilmiansyah karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian berwakil dengan penghulu

Hal 3 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Abd. Razak dan Aman Huriyu dan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 6/DST/-KKH/SKSS/II/2018 tanggal 12 Januari 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan pada tanggal 08 Nopember 2016 atas nama P3N Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ilmansyah bin Syahrin, umur 30 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama islam (sirri) pada tahun 2016 yang lalu di Desa Binawara. Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II karena kendaraan yang untuk mengantar pengantin sangat terbatas, hanya 2 (dua) buah motor sehingga cukup untuk mempelai berdua, ibu dan kakak saksi namun saksi yakin telah terjadi pernikahan antara para pemohon dan saksi juga mengetahui dari catatan yang diberikan oleh penghulu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah kakak kandung pemohon II yang bernama Ilmiansyah yang kemudian berwakil dengan penghulu dan saksi nikahnya saksi tidak tahu karena disediakan dari penghulunya dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin,

Hal 5 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Misriansyah bin Abdul Wahab, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai kakak ipar pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi tidak hadir ketika pernikahan tersebut namun mengetahuinya dari catatan penghulu
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama Ilmiansyah dengan saksi 2 (dua) orang dan mahanya tidak tahu namun selama menjadi suami istri antara pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut status pemohon I adalah jejak dan pemohon II adalah perawan serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Hal 6 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 08 Nopember 2016 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil

Hal 7 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II di akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri yang telah menikah secara sirri meskipun demikian alat bukti *a quo* perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 08

Hal 8 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kakak kandung pemohon II bernama Ilmiansyah yang kemudian berwakil dengan penghulu bernama Abdus Syukur dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abd. Razak dan Aman Huriyu, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebagai wali nikahnya kakak kandung pemohon II bernama Ilmiansyah yang kemudian berwakil dengan penghulu bernama Abdus Syukur dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Abd. Razak dan Aman Huriyu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hal 9 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang memperlakukan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa antara permohonan para pemohon serta keterangan para saksi dan semua kejadian dipersidangan telah bersesuaian satu sama lain, sehingga dijadikan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para pemohon dipersidangan yakin serta mengetahui secara jelas dan pasti bahwa para pemohon adalah suami istri meskipun kedua saksi tidak hadir ketika akad nikah tersebut, namun saksi pertama adalah saudara kandung pemohon II, maka Majelis menganggap keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain dan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini kakak kandung pemohon II mewakilkannya kepada penghulu dengan kekuasaan mutlak, dikarenakan perwakilan tersebut tanpa disertai syarat tertentu;

Menimbang, bahwa dalam prinsip wakalah, sifat kemutlakan dalam sebuah perwakilan tidak boleh serta merta membolehkan si wakil bertindak semena-mena, melainkan harus sejalan dengan asas kemaslahatan dan kepatutan, sebagaimana sebuah dhabith al-fiqri yang disebutkan oleh sayyid sabiq dalam fiqh as-sunnah jilid 2 bab al-wilayat ala az-zawaj

Hal 10 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



(perwalian nikah), sub bab al-Wakalah fi az-zawaj (perwakilan dalam nikah)  
hal.245 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Artinya : “sesuatu yang sudah dianggap biasa secara ‘urf, kedudukannya  
adalah sama dengan persyaratan (dalam wakalah)”.

Menimbang, bahwa dengan adanya adat istiadat (‘urf) yang sudah  
mengakar sebagai kebijakan lokal masyarakat setempat yang terbiasa  
menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan mewakili perwalian  
nikah pada para penghulu kampung, maka secara tersirat dapat dimaklumi  
bahwa kemutlakan lafaz wakalah dalam kasus ini dengan sendirinya  
dibatasi oleh kebiasaan (‘urf) penduduk setempat, sehingga dengan  
demikian tindakan kakak kandung pemohon II yang mewakili kembali  
urusan perwalian nikah kepada penghulu kampung yang bernama Abdus  
Syukur **dapat dibenarkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka  
telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi  
syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum  
Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana  
dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis  
Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih  
oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai  
berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya  
diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini,  
yang berbunyi:

ولو ادّعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بما حق من الحقوق كالصّدّاق  
والنّفقة والمراث ولم يقترن

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria,

Hal 11 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



*maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah);"*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1

Hal 12 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (DARMANSYAH BIN SUKEMMA) dengan Pemohon II (ALUH MUSLIMAH BINTI SYAHRUN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2016 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami Rofik Samsul Hidayat,

Hal 13 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,MH. sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy.

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1 Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000
2 Biaya Proses	:	Rp 50.000
3 Biaya Panggilan	:	Rp 500.000
4 Redaksi	:	Rp 5.000
5 Meterai	:	Rp 6.000
Jumlah	:	Rp 591.000

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Batulicin, 14 Februari 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 14 dari 14 hal, Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)